

**PENGUKURAN RENCANA AKSI TRIWULAN I KECAMATAN AWANGPONE TAHUN 2022**  
**MONITORING DAN EVALUASI SAKIP**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN / KEBERHASILAN	SOLUSI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB					
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27	28					
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	12 BLN	11,667,725,082	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	20%					20%					kelengkapan personil,sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	kurang koordinasi lintas sektor,masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban	Dapat dikatakan tidak mengalami keberhasilan karena belum mencapai target sesuai perencanaan	Mengoptimalkan semua potensi untuk perbaikan bulan berikutnya sehingga target dapat tercapai	Tingkatkan koordinasi dan Kinerja Pelayanan sesuai SOP	adanya perbaikan koordinasi dim peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas aparatur	Sekretariat			
			1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen)	100%	12 BLN	22,568,300	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	28%							28%					ketersediaan tenaga SDM pendukung perencanaan dan evaluasi kecamatan	kurangnya koordinasi antar sektor internal kecamatan yg menghambat proses perencanaan dan evaluasi	berhasil, karena capaian kegiatan melebihi target	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Penyesuaian waktu dalam melakukan pelaporan perencanaan	memperbaiki koordinasi internal	kasubag program	
			2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan yang terbayarkan	100%	12 BLN	11,233,128,866	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	19%							19%						ketersediaan tenaga SDM pendukung pengelolaan keuangan kecamatan	Terbatasnya Dana Administrasi Keuangan terhadap Tenaga Honorer yang Mendapatkan Jasa administrasi Keuangan	belum berhasil karena tidak sesuai target	Tetap melakukan pembayaran tunjangan ASN dengan tepat waktu	perhitungan yang matang dalam hal melakukan perencanaan	Menganggarkan Jumlah Jasa Administrasi Temaga Honorer yang Mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan	kasubag program
			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	12 BLN	166,627,398	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	20%							20%						ketersediaan tenaga SDM pendukung pengelolaan administrasi kecamatan	kurang koordinasi internal,masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban	belum berhasil karena tidak sesuai target	Melakukan pembayaran administrasi perkantoran secara tepat waktu	kesesuaian SSH yang harus disempurnakan terlebih dahulu	adanya perbaikan koordinasi dim peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat
			4.Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya serta Meubeler Kantor	100%	12 BLN	53,981,000	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%							0%						ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang milik daerah	masih kurangnya sinergitas internal dalam pengelolaan barang milik daerah	belum adanya pencairan dana	melakukan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantort secara berkala	pendataan kebutuhan prealatan dan perlengkapan pegawai setiap ruangan	adanya perbaikan komunikasi internal pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Sekretariat
			5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening Listri,Telpon/wifi ,Air yang terbayar (rekening) dan biaya jasa umum pelayanan kantor	100%	12 BLN	127,596,048	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	22%							22%						ketersediaan sarana pendukung penunjang urusan pemerintahan	Fasilitas Penyediaan Jasa tidak sepenuhnya mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	belum berhasil karena tidak sesuai target	pembayaran yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tagihan	Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.	Adanya Pengembangan dalam Rangka Inovasi Pelayanan	Sekretariat
			6.Pemeliharaan Barangmilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit), Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	100%	12 BLN	63,823,470	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	31%							31%						tersediaan sarana dan prasarana pendukung	Tingginya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Dikarenakan Luas Wilayah dan Infrastruktur jalan yang Tidak Mendukung	berhasil, karena capaian melebihi target yang ada	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah	adanya perbaikan penganggaran	Kasubag Umum
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12 BLN	28,017,800	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	19%					19%						kelengkapan personil,sarana dan prasarana penunjang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	masih kurangnya sinergitas internal dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	belum berhasil karena tidak sesuai target	Memaksimalkan sumberdaya manusia PNS maupun non PNS yang ada di Kecamatan	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Da lam hal pelayanan Publik	Perlu Ada Pengembangan dalam Rangka Inovasi Pelayanan	Kasubag Umum			



		1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12 BLN	19,700,000	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	15%				ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kurang koordinasi external, masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban pemerintahan desa	belum berhasil	Mempebaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD
		2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	100%	12 BLN	18,755,600	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	39%				ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kurang koordinasi external, masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban pemerintahan desa	berhasil karena melampau target	Mempebaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD

Lappo Ase, 08 April 2022

AKM ALUDDIN, S.P.Ts  
 Camat Awangpone  
 Nip. 19670404199103022

**PENGUKURAN RENCANA AKSI TRIWULAN II KECAMATAN AWANGPONE TAHUN 2022**  
**MONITORING DAN EVALUASI SAKIP**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN / KEBERHASILAN	SOLUSI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				27	28			
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan			11,667,725,082																	kelengkapan personil,sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	kurang koordinasi lintas sektor,masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban	belum berhasil karena tidak sesuai target	Mengoptimalkan semua potensi untuk perbaikan bulan berikutnya sehingga target dapat tercapai	Tingkatkan koordinasi dan Kinerja Pelayanan sesuai SOP	adanya perbaikan koordinasi dim peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas aparatur	Sekretariat			
			1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen)			22,568,300																			ketersediaan tenaga SDM pendukung perencanaan dan evaluasi kecamatan	kurangnya koordinasi antar sektor internal kecamatan yg menghambat proses perencanaan dan evaluasi	berhasil, karena capaian kegiatan mencapai 50 %	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Penyesuaian waktu dalam melakukan pelaporan perencanaan	memperbaiki koordinasi internal	kasubag program	
			2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan yang terbayarkan			11,233,128,866																				ketersediaan tenaga SDM pendukung pengelolaan keuangan kecamatan	Terbatasnya Dana Administrasi Keuangan terhadap Tenaga Honorer yang Mendapatkan Jasa administrasi Keuangan	belum berhasil karena tidak sesuai target	Tetap melakukan pembayaran tunjangan ASN dengan tepat waktu	perhitungan yang matang dalam hal melakukan perencanaan	Menganggarkan Jumlah Jasa Administrasi Temaga Honorer yang Mendapatkan Jasa Admnistrasi Keuangan	kasubag program
			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)			166,627,398																				ketersediaan tenaga SDM pendukung pengelolaan administrasi kecamatan	kurang koordinasi internal,masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban	kurang berhasil, karena capaian kurang mencapai 50 %	Melakukan pembayaran administrasi perkantoran secara tepat waktu	kesesuaian SSH yang harus disempurnakan terlebih dahulu	adanya perbaikan koordinasi dim peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat
			4.Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya serta Mebeler Kantor			53,981,000																				ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang milik daerah	masih kurangnya sinergitas internal dalam pengelolaan barang milik daerah	belum adanya pencairan dana	melakukan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantort secara berkala	pendataan kebutuhan prealatan dan perlengkapan pegawai setiap ruangan	adanya perbaikan komunikasi internal pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Sekretariat
			5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening Listri,Telpon/wifi ,Air yang terbayar (rekening) dan biaya jasa umum pelayanan kantor			127,596,048																				ketersediaan sarana pendukung penunjang urusan pemerintahan	Fasilitas Penyediaan Jasa tidak sepenuhnya mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	berhasil, karena capaian kegiatan mencapai 100 %	pembayaran yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tagihan	Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.	Adanya Pengembangan dalam Rangka Inovasi Pelayanan	Sekretariat
			6.Pemeliharaan Barangmilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit), Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara			63,823,470																				ktersediaan sarana dan prasarana pendukung	Tingginya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Dikarenakan Luas Wilayah dan Infrastruktur jalan yang Tidak Mendukung	belum berhasil karena tidak sesuai target	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah	adanya perbaikan penganggaran	Kasubag Umum
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan kuaallas Penyelenggaraan n Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28,017,800																	kelengkapan personil,sarana dan prasarana penunjang urusan penyelenggaraa n pemerintahan daerah	masih kurangnya sinergitas internal dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	berhasil karena melebihi target	Memaksimalkan sumberdaya manusia PNS maupun non PNS yang ada di Kecamatan	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Da lam hal pelayanan Publik	Perlu Ada Pengembangan dalam Rangka Inovasi Pelayanan	Kasubag Umum			



		1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12 BLN	19,700,000	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	29%				ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kurang koordinasi external, masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban pemerintahan desa	belum berhasil	Mempebaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD
		2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	100%	12 BLN	18,755,600	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	92%				ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kurang koordinasi external, masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban pemerintahan desa	berhasil melebihi target	Mempebaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD

Lappo Ase, 07 Juli 2022

AKHIL AWANGPONE  
 AKHIL AWANGPONE  
 Camat  
 Kecamatan Awangpone  
 Tingkat : Pembina Tk.I,IV/b  
 Nip.19670404199103022

**PENGUKURAN RENCANA AKSI TRIWULAN III KECAMATAN AWANGPONE TAHUN 2022**  
**MONITORING DAN EVALUASI SAKIP**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN / KEBERHASILAN	SOLUSI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB				
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					27	28			
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	12 BLN	11,667,725,082	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	80%					80%					kelengkapan personil,sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	kurang koordinasi lintas sektor,masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban	Dapat dikatakan berhasil karena melebihi target	Mengoptimalkan semua potensi untuk perbaikan bulan berikutnya sehingga target dapat tercapai	Tingkatkan koordinasi dan Kinerja Pelayanan sesuai SOP	adanya perbaikan koordinasi dim peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas aparatur	Sekretariat		
			1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen)	100%	12 BLN	22,568,300	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	80%						80%					ketersediaan tenaga SDM pendukung perencanaan dan evaluasi kecamatan	kurangnya koordinasi antar sektor internal kecamatan yg menghambat proses perencanaan dan evaluasi	berhasil, karena capaian kegiatan mencapai 80 %	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Penyesuaian waktu dalam melakukan pelaporan perencanaan	memperbaiki koordinasi internal	kasubag program	
			2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan yang terbayarkan	100%	12 BLN	11,233,128,866	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	75%						75%						ketersediaan tenaga SDM pendukung pengelolaan keuangan kecamatan	Terbatasnya Dana Administrasi Keuangan terhadap Tenaga Honorer yang Mendapatkan Jasa administrasi Keuangan	berhasil, karena capaian kegiatan mencapai 85 %	Tetap melakukan pembayaran tunjangan ASN dengan tepat waktu	perhitungan yang matang dalam hal melakukan perencanaan	Menganggarkan Jumlah Jasa Administrasi Temaga Honorer yang Mendapatkan Jasa Admnistrasi Keuangan	kasubag program
			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	12 BLN	166,627,398	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	76%						76%						ketersediaan tenaga SDM pendukung pengelolaan administrasi kecamatan	kurang koordinasi internal,masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban	kurang berhasil, karena capaian kurang mencapai 50 %	Melakukan pembayaran administrasi perkantoran secara tepat waktu	kesesuaian SSH yang harus disempurnakan terlebih dahulu	adanya perbaikan koordinasi dim peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat
			4.Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya serta Meubeler Kantor	100%	12 BLN	53,981,000	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%						0%						ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang milik daerah	masih kurangnya sinergitas internal dalam pengelolaan barang milik daerah	berhasil, karena capaian kegiatan mencapai 100 %	melakukan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantort secara berkala	pendataan kebutuhan prealatan dan perlengkapan pegawai setiap ruangan	adanya perbaikan komunikasi internal pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Sekretariat
			5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening Listri,Telpon/wifi ,Air yang terbayar (rekening) dan biaya jasa umum pelayanan kantor	100%	12 BLN	127,596,048	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	65%						65%						ketersediaan sarana pendukung penunjang urusan pemerintahan	Fasilitas Penyediaan Jasa tidak sepenuhnya mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	berhasil, karena capaian kegiatan mencapai 65 %	pembayaran yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tagihan	Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.	Adanya Pengembangan dalam Rangka Inovasi Pelayanan	Sekretariat
			6.Pemeliharaan Barangmilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit), Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	100%	12 BLN	63,823,470	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	75%						75%						tersediaan sarana dan prasarana pendukung	Tingginya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Dikarenakan Luas Wilayah dan Infrastruktur jalan yang Tidak Mendukung	berhasil, karena capaian kegiatan mencapai 75 %	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah	adanya perbaikan penganggaran	Kasubag Umum
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan kuaallas Penyelenggaraan n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12 BLN	28,017,800	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	78%						78%						kelengkapan personil,sarana dan prasarana penunjang urusan penyelenggaraa n pemerintahan daerah	masih kurangnya sinergitas internal dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	berhasil	Memaksimalkan sumberdaya manusia PNS maupun non PNS yang ada di Kecamatan	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Da lam hal pelayanan Publik	Perlu Ada Pengembangan dalam Rangka Inovasi Pelayanan	Kasubag Umum



		1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12 BLN	19,700,000	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	52%				ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kurang koordinasi external, masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban pemerintahan desa	belum berhasil	Mempebaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD
		2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	100%	12 BLN	18,755,600	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100%				ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan		berhasil	Mempebaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD

Lappo Ase, 04 Oktober 2022

AKMALUDDIN, S.P.Ts  
 Camat Awangpone  
 Nip. 19670404199103022

**PENGUKURAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV KECAMATAN AWANGPONE TAHUN 2022**  
**MONITORING DAN EVALUASI SAKIP**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN / KEBERHASILAN	SOLUSI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					27	28
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Awangpone	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100%	12 BLN	11,667,725,082	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.54				99.54				kelengkapan personil,sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	kurang koordinasi lintas sektor,masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban	tidak berhasil mencapai target	Mengoptimalkan semua potensi untuk perbaikan bulan berikutnya sehingga target dapat tercapai	Tingkatkan koordinasi dan Kinerja Pelayanan sesuai SOP	adanya perbaikan koordinasi dim peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas aparatur	Sekretariat	
			1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen)	100%	12 BLN	22,568,300	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	98.67				98.67				ketersediaan tenaga SDM pendukung perencanaan dan evaluasi kecamatan	kurangnya koordinasi antar sektor internal kecamatan yg menghambat proses perencanaan dan evaluasi	tidak berhasil mencapai target	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Penyesuaian waktu dalam melakukan pelaporan perencanaan	memperbaiki koordinasi internal	kasubag program	
			2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan yang terbayarkan	100%	12 BLN	11,233,128,866	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.68				99.68				ketersediaan tenaga SDM pendukung pengelolaan keuangan kecamatan	Terbatasnya Dana Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terhadap Tenaga Honorer yang Mendapatkan Jasa administrasi Keuangan	Berhasil walau masih kurang dari target tg seharusnya	Tetap melakukan pembayaran tunjangan ASN dengan tepat waktu	perhitungan yang matang dalam hal melakukan perencanaan	Menganggarkan Jumlah Jasa Administrasi Temaga Honorer yang Mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan	kasubag program	
			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	12 BLN	166,627,398	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.77				99.77				ketersediaan tenaga SDM pendukung pengelolaan administrasi kecamatan	kurang koordinasi internal,masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban	kurang berhasil, karena capaian kurang mencapai 50 %	Melakukan pembayaran administrasi perkantoran secara tepat waktu	kesesuaian SSH yang harus disempurnakan terlebih dahulu	adanya perbaikan koordinasi dim peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat	
			4.Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya serta Mebeler Kantor	100%	12 BLN	53,981,000	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	99.89				99.89				ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang milik daerah	masih kurangnya sinergitas internal dalam pengelolaan barang milik daerah	tidak berhasil mencapai target	melakukan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantort secara berkala	pendataan kebutuhan prealatan dan perlengkapan pegawai setiap ruangan	adanya perbaikan komunikasi internal pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Sekretariat
			5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening Listri,Telpon/wifi ,Air yang terbayar (rekening) dan biaya jasa umum pelayanan kantor	100%	12 BLN	127,596,048	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	84.35				84.35				ketersediaan sarana pendukung penunjang urusan pemerintahan	Facilitas Penyediaan Jasa tidak sepenuhnya mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	tidak berhasil mencapai target	pembayaran yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tagihan	Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.	Adanya Pengembangan dalam Rangka Inovasi Pelayanan	Sekretariat	
			6.Pemeliharaan Barangmilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit), Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	100%	12 BLN	63,823,470	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	96.57				96.57				tersediaan sarana dan prasarana pendukung	Tingginya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Dikarenakan Luas Wilayah dan Infrastruktur jalan yang Tidak Mendukung	tidak berhasil mencapai target	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah	adanya perbaikan penganggaran	Kasubag Umum	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12 BLN	28,017,800	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.97				99.97				kelengkapan personil,sarana dan prasarana penunjang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	masih kurangnya sinergitas internal dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	tidak berhasil mencapai target	Memaksimalkan sumberdaya manusia PNS maupun non PNS yang ada di Kecamatan	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Da lam hal pelayanan Publik	Perlu Ada Pengembangan dalam Rangka Inovasi Pelayanan	Kasubag Umum	

			1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	100%	12 BLN	13,017,800		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100.00				100.00				ketersediaan SDM urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan	berhasil mencapai target	Melakukan Koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan semua instansi vertikal yang terkait	agar perlu pembagian kerja dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan	perbaikan koordinasi internal dan eksternal	Kasi pemerintahan dan PPMD	
			2. Penelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi Penelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100%	12 BLN	15,000,000		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.94				99.94				ketersediaan SDM urusan penyelenggaraan daerah tingkat kecamatan	masih kurang koordinasi	tidak berhasil mencapai target	Melakukan Koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan semua instansi vertikal yang terkait	agar perlu pembagian kerja dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan	perbaikan koordinasi internal dan eksternal	Kasi pemerintahan dan PPMD
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan Kelurahan maccope	100%	12 BLN	149,968,384		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.96				99.96				ketersediaan aparatur, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat	koordinasi dan sinergitas internal dan eksternal	belum berhasil	Memaksimalkan dokumen evaluasi pada kegiatan kecamatan sehat serta kegiatan di masyarakat	agar perlu adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	memperbaiki sinergitas untuk kelancaran kegiatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD
			1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	2 Kegiatan	74,768,384		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100.00				100.00				ketersediaan aparatur, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat	koordinasi dan sinergitas internal dan eksternal	belum berhasil	Memperbaiki pencapaian agar tetap maksimal	agar perlu adanya stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa	memperbaiki sinergitas untuk kelancaran kegiatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD
			2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	5 Kegiatan	75,200,000		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.91				99.91				ketersediaan aparatur, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat	koordinasi dan sinergitas internal dan eksternal	tidak berhasil mencapai target	Memperbaiki pencapaian agar tetap maksimal	agar mengoptimalkan SDM yang ada terhadap kegiatan pemberdayaan Desa	memperbaiki sinergitas untuk kelancaran kegiatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD
			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	12 BLN	27,000,000		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100.00				100.00				ketersediaan personil keamanan dengan dukungan Polsek dan Danramil	berhasil mencapai target	Mempertahankan pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait	tetap berupaya maksimal dlm koordinasi trantibum	kasi Trantibum	
			1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	100%	12 BLN	27,000,000		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100.00				100.00				ketersediaan personil keamanan dengan dukungan Polsek dan Danramil	berhasil mencapai target	Mengoptimalkan kinerja Tripika terhadap pengawasan di wilayah kecamatan	diperlukan Rapat Koordinasi Lintas sektor	tetap berupaya maksimal dlm koordinasi trantibum	kasi Trantibum	
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa (laporan) dan Koordinasi pendampingan Desa	100%	12 BLN	38,455,600		25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.98				99.98				ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kurang koordinasi external, masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban pemerintahan desa	tidak berhasil mencapai target	Memperbaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD

		1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	12 BLN	19,700,000	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	100.00				100.00	ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan	berhasil mencapai target	Mempebaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD	
		2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	100%	12 BLN	18,755,600	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	99.98				99.98	ketersediaan tenaga SDM pendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan	kurang koordinasi external, masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yg diemban pemerintahan desa	tidak berhasil mencapai target	Mempebaiki pencapaian agar tetap maksimal	Diperlukan optimalisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi pemerintahan desa	sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kecamatan	Kasi Pemerintahan dan PPMD

Lappo Ase, 31 Desember 2022


 MAT AWANGPONE  
 AKMALUDDIN, S.P.Ms  
 Tingkat : Pembina Tk.I,IV/b  
 Nip.19670404199103022